



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA PULUH TIGA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 411/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
 - b. bahwa guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Puluh Tiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperpanjang mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENCKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
 2. Bupati/Walikota se-DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Pelaksana BPBD DIY;
 5. Kepala Bappeda DIY;
 6. Kepala BPKA DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.